

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SMA N 1 CANGKRINGAN

IMPLEMENTATION SCHOOL POLICY ISIGHT ENVROMENTALLY AT SMA N 1 CANGKRINGAN

Koko Dwi Cahyo

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

2kdwi68@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang proses implementasi kebijakan, implementasi ditinjau dari empat faktor penentu kebijakan , serta faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan sekolah berwawasan lingkungan di SMA N 1 Cangkringan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi sekolah berwawasan lingkungan di SMA N 1 Cangkringan sudah melalui tahap pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Sekolah menunjuk Tim Adiwiyata sebagai pengelola kebijakan, anggaran juga sudah ditentukan dengan jelas, kemudian sarana prasarana dibuat agar berwawasan lingkungan. Sosialisasi dan partisipasi merupakan cara yang dilakukan agar subjek kebijakan dapat memahami. (2) Implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi/ sikap, dan struktur organisasi. (3) Faktor penghambatnya adalah sekolah tidak mampu untuk menyediakan sarana prasaran dengan pengadaan alat yang membutuhkan biaya tinggi. (4) Faktor pendukungnya adalah letak sekolah yang berada di kaki Gunung Merapi membuat lingkungan menjadi berhawaa sejuk, hijau dan terasa asri. Warga sekolah mendukung dengan memahami dan ikut berpartisipasi dalam kebijakan berwawasan lingkungan, serta sarana prasarana yang sudah berwawasan lingkungan.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, Adiwiyata, Sekolah Berwawasan Lingkungan*

ABSTRACT

This study aims to describe: policy implementation process, implementation in terms of four policy determinants, inhibiting factors and supporting factors for the implementation of green school at SMA N 1 Cangkringan. This type of research is descriptive qualitative research. The results showed that: (1) The implementation of green school in SMA N 1 Cangkringan had been through the stages of organizing, interpreting, and applying. The school appointed the Adiwiyata Team as the manager of the policy, the budget had also been clearly determined, then the infrastructure was made to become green school. Dissemination and participation are ways that policy subjects can understand. (2) Defining factors of policy implementation include communication, resources, disposition / attitude, and organizational structure. (3) The inhibiting factor is that schools are unable to provide infrastructure by providing high-cost equipment. (4) The supporting factor is the location of the school at the foot of Mount Merapi, making the environment cool, green and beautiful. School residents support by understanding and participating the rules of green school, and the infrastructure that has been environmentally friendly.

Keywords: *Implementation, Policy, Adiwiyata, Green School*

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari dasar pemikiran tentang kondisi lingkungan yang semakin lama mengalami penurunan kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor lingkungan sendiri dan juga disebabkan oleh manusia sendiri.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dapat juga berupa perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Membuang sampah sembarangan merupakan salah satu contoh perilaku manusia yang masih banyak dilakukan. Penumpukan sampah yang banyak tersebut akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan.

Dalam UU No. 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pencegahan hukum. Syukri Hamzah (2012: 14), bahwa pengelolaan lingkungan yang dilakukan dapat dikatakan efektif tergantung dari upaya mengadopsi etika yang baik dalam berperilaku. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang peduli dengan keadaan lingkungan dan berusaha selalu menjaga kondisi lingkungan.

Penanaman nilai kepedulian lingkungan pengelolaan lingkungan dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional suatu negara. Hal tersebut juga diperkuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kepedulian terhadap lingkungan dalam sekolah ditanamkan ke siswa melalui program yang dilakukan di sekolah, SMA N 1 Cangkringan ditunjuk oleh pemerintah kabupaten Sleman dan dibimbing oleh Dinas Lingkungan Hidup

menerapkan kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan.

Terlebih SMA N 1 Cangkringan masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Tujuan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi tersebut adalah untuk perlindungan bagi sumber-sumber air, sungai, dan penyangga sistem kehidupan kabupaten/ kota-kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali dan Magelang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Nurul Zuriah, 2006: 47).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA N 1 CANGKRINGAN. Penelitian dilakukan pada November-Desember 2018.

Subjek dan Objek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Tim Adiwiyata, Guru, dan Bagian Kurikulum. Sedangkan objeknya adalah implementasi kebijakan sekolah berwawasan lingkungan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mempunyai tahap yang harus dilakukan setelah proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang baik yaitu: *data reduction* (reduksi data), *data display* (interpretasi data), *conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan) (Sugiyono, 2012: 246-252).

Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan triangulasi sumber dan teknik

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Implementasi Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Implementasi kebijakan sekolah berwawasan lingkungan di SMA N 1 Cangkringan melewati tahapan pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

1) Tahap Pengorganisasian

SMA N 1 Cangkringan memiliki tim untuk melaksanakan Kebijakan Sekolah berwawasan Lingkungan. Tim yang terbentuk merupakan Tim Adiwiyata yang mempunyai kepengurusan sendiri. Kemudian juga terdapat POKJA yang mempunyai tugas masing-masing yang mencakup seluruh lingkungan yang sekolah.

2) Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi implementasi Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan di SMA N 1 Cangkringan menggunakan sosialisasi, partisipasi dan integrasi kurikulum. Sosialisasi dilaksanakan di berbagai kesempatan yang ada, Proses interpretasi yang lain adalah dengan partisipasi, dalam Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan diperlukan partisipasi dari seluruh pihak sekolah sehingga dalam tahap interpretasi partisipasi menjadi hal yang cukup efektif dilakukan.

3) Tahap Aplikasi

Tim Adiwiyata menjadi tanggapan pertama dari sekolah untuk menanggapi Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan di SMA N 1 Cangkringan menggunakan 20% dari Rencana Anggaran Sekolah (RAS) dan juga RAPB, RKS, dan RKAS.

Implementasi Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan di SMA N 1 Cangkringan ditinjau dari Empat Faktor Penentu Kebijakan

Model Edward III menjelaskan terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan pada implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2012: 90-92).

Komunikasi kebijakan terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi transisi, dimensi kejelasan, dimensi konsistensi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah dilakukan di berbagai kesempatan. Dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan menginginkan kebijakan dapat dimengerti oleh implementator dan sasaran kebijakan. berwawasan lingkungan.

Sumber daya pada proses implementasi kebijakan sekolah berwawasan lingkungan berhubungan dengan partisipasi seluruh warga sekolah. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

Kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan di SMA N 1 Cangkringan adalah Tim Adiwiyata. Tim Adiwiyata mempunyai wewenang dalam seluruh kegiatan tentang kebijakan sekolah berwawasan lingkungan

Disposisi atau sikap adalah karakteristik dari pelaksana kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sleman saat awal penunjukan melakukan sosialisasi dan pembimbingan terhadap sekolah. Saat awal dinas datang ke sekolah melakukan sosialisasi mengenai sekolah berwawasan lingkungan.

Struktur birokrasi mempunyai pengaruh dalam implementasi kebijakan, implementasi kebijakan akan melibatkan banyak orang didalamnya. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk mempermudah implementasi kebijakan dan memberi pedoman kepada pelaksana kebijakan.

Faktor penghambat adalah kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah. Pengelolaan sampah juga masih menjadi faktor yang belum dapat diatasi dengan sempurna oleh pihak sekolah. Sedangkan faktor pendukung tersebut mulai dari lingkungan sekolah, sarana prasarana, warga sekolah dan pengolahan sampah. Warga sekolah sudah banyak yang paham mengenai kebijakan sekolah berwawasan lingkungan sehingga lingkungan dan sarana prasarana yang ada di sekolah dapat terjaga. Pengolahan sampah di sekolah sudah mempunyai bagian sendiri yaitu Bank Sampah. Bank Sampah bertugas mengumpulkan, mencatat, dan mengolah sampah yang dihasilkan di sekolah.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan memiliki tiga tahap yang harus dilakukan agar sesuai dengan tujuan kebijakan. Charles O. Jones dalam buku *Politik Ideologi Pendidikan* (Arif Rohman, 2009 :135) menyebutkan ada tiga tahapan implementasi kebijakan antara lain adalah pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Tahap pengorganisasian di SMA N 1 Cangkringan dalam rangka melaksanakan kebijakan sudah dilaksanakan. Tim pelaksana kebijakan beserta tugas masing-masing pelaksana sudah dibentuk dengan pembentukan Tim Adiwiyata, Bank Sampah, dan Pengelompokan Kerja (POKJA).

Tahap interpretasi Kebijakan Sekolah Berwawasan di SMA N 1 Cangkringan menggunakan cara sosialisasi dan partisipasi. Sosialisasi dilakukan kepada peserta didik, orang tua/ wali, komite sekolah, guru, dan karyawan. Partisipasi melibatkan seluruh warga sekolah. Tim Adiwiyata beranggotakan guru yang setiap semesternya selalu diubah dan digantikan oleh setiap guru sehingga guru dapat memahami dengan baik kebijakan berwawasan lingkungan.

Model Edward III dalam buku *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori*

dan Aplikasi (Subarsono, 2012: 90-92) menjelaskan terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan pada implementasi kebijakan. Empat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Model Edward III mengemukakan bahwa komunikasi kebijakan tersiri dari 3 dimensi yaitu dimensi transisi, dimensi kejelasan, dimensi konsistensi. Sosialisasi menjadi alat komunikasi SMA N 1 Cangkringan untuk menyampaikan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan. Seluruh warga sekolah terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Siswa-siswa terlihat sudah mengerti maksud dan tujuan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan.

Model Edward III menjelaskan bahwa dimensi konsistensi dalam komunikasi kebijakan menginginkan implementasi kebijakan berjalan efektif dengan perintah-perintah yang jelas dan konsisten. Setiap kegiatan yang dilakukan semua warga sekolah ikut berperan serta aktif dalam kegiatan dan bekerja dalam bidangnya masing-masing.

Sumber daya manusia dari pihak sekolah dapat dilihat dari kinerja tim pengelola kebijakan, pengetahuan tentang kebijakan berwawasan lingkungan, partisipasi seluruh warga sekolah, dan informasi yang relevan dengan tentang implementasi kebijakan dan persiapan lainnya. Anggaran yang menggunakan 20% dari Rencana Anggaran Sekolah (RAS) dan juga RAPB, RKS, dan RKAS.. Tim Adiwiyata mempunyai wewenang dalam seluruh kegiatan tentang kebijakan sekolah berwawasan lingkungan

Sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Pihak dinas lingkungan hidup sebagai pihak yang menunjuk sekolah menjadi sekolah berwawasan lingkungan tidak lepas tangan. Sekolah sekarang sedang mengusahakan untuk Adiwiyata mandiri, sehingga peran dari dinas tidak terlalu banyak. Sebagai

Adiwiyata mandiri sekolah membimbing setidaknya tiga sekolah untuk menjadi adiwiyata mandiri. Akan tetapi sekolah untuk pemenuhan sarana prasarana yang mempunyai biaya pengadaan yang tinggi tetap mengajukan proposal kepada dinas lingkungan hidup.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sekolah berwawasan lingkungan di SMA N 1 Cangkringan dibuat berdasarkan pada pedoman Adiwiyata. Pedoman adiwiyata menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan sekolah berwawasan, Tim Adiwiyata sebagai tim yang ditunjuk untuk mengelola bekerja berdasarkan apa yang ada dalam pedoman adiwiyata.

Faktor penghambat adalah kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah. Pengelolaan sampah juga masih menjadi faktor yang belum dapat diatasi dengan sempurna oleh pihak sekolah. Sedangkan, Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah berwawasan lingkungan. Faktor pendukung tersebut mulai dari lingkungan sekolah, sarana prasarana, warga sekolah dan pengolahan sampah. Lingkungan sekolah yang asri membuat udara di sekolah menjadi sejuk. Sarana prasarana yang terdapat di sekolah juga dibuat sedemikian rupa supaya dapat berwawasan lingkungan. warga sekolah sudah banyak yang paham mengenai kebijakan sekolah berwawasan lingkungan sehingga lingkungan dan sarana prasarana yang ada di sekolah dapat terjaga. Pengolahan sampah di sekolah sudah mempunyai bagian sendiri yaitu Bank Sampah.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Implementasi kebijakan tersebut melalui tiga tahapan implementasi yaitu: tahap pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan membentuk Tim Adiwiyata sebagai pelaksana kebijakan yang bertugas mengelola berbagai macam kegiatan. Sosialisasi dan partisipasi

digunakan pihak sekolah dalam tahap interpretasi, dilakukan kepada peserta didik, orang tua/ wali murid, komite sekolah, guru dan karyawan dan dilakukan dalam berbagai macam waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Pihak sekolah sudah melakukan penganggaran sendiri dengan menggunakan 20% dari Rencana Anggaran Sekolah (RAS) dan juga RAPB, RKS, dan RKAS, sedangkan untuk sarana prasarana dikelola oleh bagian sarana prasarana dan pemeliharanya diserahkan kepada warga sekolah.

Komunikasi dilakukan dengan kerjasama seluruh warga sekolah, warga sekolah sudah sejak awal di pahami mengenai kebijakan berwawasan lingkungan. Disposisi atau sikap meliputi warga sekolah yang sudah ikut berperan aktif dalam implementasi kebijakan, dinas lingkungan hidup sebagai penunjuk sekolah melakukan pembimbingan dan pengawasan untuk mengembangkan yang kaitannya dengan lingkungan hidup dan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan.

Faktor penghambatnya yaitu dalam pengadaan alat membutuhkan biaya yang tinggi. Sedangkan faktor pendukungnya adalah partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah.

SARAN

Pegelolaan sampah di lingkungan sekolah harus ditingkatkan, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah hanya sebatas mengumpulkan dan mencatat sampah yang dihasilkan oleh kelas. Akan tetapi dalam pengolaannya hanya dengan diserahkan oleh pengepul. Sampah kertas dapat dimanfaatkan menjadi kertas daur ulang maupun kerajinan. Bank Sampah sebagai pengelola hendaknya dapat memanfaatkan hal tersebut menjadi hal yang lebih bermanfaat.

Jumat bersih menjadi kegiatan yang melibatkan seluruh peran warga sekolah. waktu yang diberikan selama 30

menit masih kurang, karena dalam kegiatan jumat bersih mempunyai kegiatan yang banyak sehingga dengan waktu tersebut kegiatan tersebut menjadi kurang maksimal. Waktu dalam kegiatan tersebut dapat ditambah ataupun dilakukan bukan hanya dihari jumat dengan program serupa dan dengan nama yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Nurul Zuriah. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori – Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono. (2012). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tim Adiwiyata. (2012). *Panduan Adiwita “Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan*. Jakarta : Kementrian Lingkungan Hidup dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.